

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara target penyelundupan narkoba bagi sindikat Internasional. Indonesia dianggap sebagai wilayah strategis yang menguntungkan bagi pasar narkoba jika dilihat dari jumlah penduduk yang mewakili hampir setengah populasi regional ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) (Ilhamalamien, 2019). Jalur penyelundupan narkoba di Indonesia sendiri banyak dilakukan melalui jalur perbatasan laut, jalur perbatasan darat dan jalur udara.

Dalam kasus penyelundupan narkoba di Indonesia terutama melalui jalur laut dan jalur perbatasan darat banyak dilakukan melalui jalur tikus dan Pelabuhan tikus yang tidak dapat secara optimal di pantau oleh petugas (William, 2015). Selanjutnya untuk jalur udara penyelundupan biasanya dilakukan oleh kurir yang diiming-imingi dengan bayaran hingga ratusan juta dan dilakukan dengan berbagai modus salah satunya dengan menyelipkan narkoba di sepatu boot (Wiryono, 2020).

Jalur perbatasan laut Indonesia merupakan jalur yang paling rawan akan penyelundupan narkoba data menunjukkan 80% narkoba di Indonesia masuk melalui jalur laut, hal ini didorong oleh berbagai macam penyebab seperti sulitnya pengawasan daerah laut Indonesia

yang panjang dan luas,serta minimnya infrastruktur yang dimiliki oleh Indonesia untuk mengawasi perairan dan Pelabuhan serta berbagai masalah lainnya (Yusri, 2018).

Banyaknya penyelundupan narkoba dari jalur laut di Indonesia turut dibuktikan dengan penangkapan kasus-kasus besar di jalur ini seperti penggalan penyelundupan narkoba dari Malaysia melalui jalur laut yang berhasil digagalkan BNN (Badan Narkotika Nasional) dengan barang bukti berupa 10.293,96 gram sabu dan 147 butir ekstasi di wilayah Tanjung Balai, Sumatera Utara, pada 14 Juni 2015 (Humas BNN, 2015). Selanjutnya menurut data yang disampaikan oleh Bea Cukai pada tahun 2014 terdapat 28 kasus penyelundupan di jalur laut Indonesia oleh sindikat internasional dan 59 kasus pada tahun 2015 (Admin Web Bea dan Cukai, 2016).

Walau jalur laut menjadi jalur penyelundupan narkoba terbesar menuju ke Indonesia, jalur udara dan jalur perbatasan darat juga merupakan daerah rawan yang perlu diperhatikan dalam masalah penyelundupan narkoba, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kasus kasus besar penyelundupan di kedua jalur tersebut. menurut data tahun 2018 penyelundupan jalur udara merupakan yang paling marak diungkapkan dengan 196 kasus dan 4,075 ton barang bukti (Wildansyah, 2018).

Daerah rawan selanjutnya adalah daerah perbatasan darat, Indonesia memiliki banyak perbatasan darat dengan negara tetangga baik dengan Malaysia, Papua Nugini,dan Timor Leste, kerawanan daerah perbatasan darat akan kasus penyelundupan narkoba dapat dilihat dari berbagai kasus penyelundupan yang yang berhasil digagalkan, seperti pada kasus penyelundupan di perbatasan timor leste, aparat berhasil menggagalkan

upaya penyelundupan dengan barang bukti sabu seberat 2.456,1 gram (Humas BNN, 2012). Selanjutnya di perbatasan darat Indonesia lainnya tepatnya di perbatasan Papua Nugini sering terjadi aksi penyelundupan ganja, terhitung hingga Bulan Mei 2016 sudah ada sebanyak 23 orang warga Negara PNG yang sementara ini tengah menjalani hukuman di Lapas Narkoba di Jayapura terkait kasus penyelundupan ganja. Selain itu, tahun 2015 lalu petugas juga berhasil mengamankan Narkoba seberat 4Kg dari daerah Wutung (MC Kabupaten Merauke, 2016).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya jalur penyelundupan narkoba di Indonesia dibagi menjadi tiga jalur rawan yaitu jalur laut, udara dan jalur perbatasan darat. Namun Dalam penelitian ini akan meneliti upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani masalah penyelundupan narkoba di Indonesia terkhusus di perbatasan darat Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat ini dilakukan untuk mempersempit penelitian yang dilakukan guna memperoleh hasil penelitian dengan data yang valid dan efisien.

Pemilihan jalur perbatasan darat sebagai subjek dan objek penelitian dikarenakan jalur perbatasan darat Kalimantan Barat selain menjadi daerah rawan penyelundupan narkoba di Indonesia juga merupakan daerah yang memerlukan perhatian Khusus dari pemerintah dalam banyak bidang sehingga menarik untuk dibahas.

Kalimantan Barat merupakan sebuah provinsi di negara Indonesia yang memiliki perbatasan langsung dengan wilayah negara Malaysia tepatnya di negara bagian Serawak Malaysia. Dengan posisi geografis yang berbatasan langsung dengan wilayah negara Malaysia, menjadikan provinsi Kalimantan Barat rawan bagi kegiatan kejahatan transnasional termasuk penyelundupan narkoba oleh sindikat internasional yang

berasal dari wilayah negara tetangga tersebut (Niko & Thea Purnama, 2020).

Jalur perbatasan darat Indonesia dan Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat dikatakan sebagai jalur rawan kejahatan transnasional termasuk penyelundupan narkoba dikarenakan perbatasan darat di Kalimantan Barat kerap menjadi pilihan sebagai jalur selundupan bagi sindikat narkoba internasional melalui Malaysia untuk memasukkan narkoba ke wilayah Indonesia, statement ini didukung oleh banyaknya kasus penyelundupan yang berhasil dideteksi di daerah tersebut (Humas BNN, 2018).

Rawannya daerah perbatasan Indonesia juga dikarenakan keadaan geografis perbatasan darat kedua negara, dimana perbatasan darat ini memiliki Panjang hingga mencapai 966 Km, yang membentang di lima kabupaten di provinsi Kalimantan Barat (Yunanto, 2020). Melihat panjangnya perbatasan langsung dua negara di provinsi ini tidak heran daerah tersebut menjadi sangat rawan penyelundupan narkoba karena memang daerah perbatasan yang luas akan menuntut pengamanan dan perhatian yang ekstra pada daerah perbatasan tersebut.

Melihat masalah penyelundupan narkoba yang cukup intens yang terjadi di Indonesia terutama daerah perbatasan darat Indonesia, pemerintah Indonesia sebenarnya telah melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi masalah tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia diantaranya dengan membentuk Kerjasama internasional baik bilateral dan multilateral dan beberapa tindakan pengamanan oleh Lembaga dalam negeri.

Kerjasama yang dibangun pemerintah Indonesia dalam penanganan penyelundupan narkoba telah berhasil membentuk beberapa badan regional antar negara ASEAN di antaranya *The ASEAN Senior Officials on Drugs* (ASOD) dan lainnya (Gafar, 2012). Dalam Kerjasama bilateral Indonesia membangun Kerjasama dengan negara bersangkutan seperti Malaysia dan negara ASEAN dalam penanganan masalah narkoba.(Dirgantara, 2017).

Namun demikian upaya pemerintah Indonesia untuk menangani penyelundupan dan penyebaran narkoba melalui perbatasan darat Indonesia dan Malaysia ini nampaknya belum terlalu efisien atau belum sepenuhnya berhasil, ini ditunjukkan dengan seiring banyaknya penyelundupan narkoba yang berhasil digagalkan berbanding terbalik dengan meningkatnya penyebaran dan penggunaan narkoba skala nasional dan di provinsi Kalimantan Barat.

Data 2008-2011 yang menunjukkan penggunaan narkoba skala nasional mengalami kenaikan dari semula 1,9% pada 2008 menjadi 2,2% pada 2011, menurut data ini tidak kurang dari 4 juta orang Indonesia di usia 10-60 tahun merupakan pengguna narkoba (Oetari Poernamasasi, 2014). Bukti lainnya yang menunjukkan kurang efektifnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebelumnya juga dapat dibuktikan dengan masih banyaknya kasus penyelundupan di perbatasan darat Indonesia dan Malaysia di Kalimantan barat terutama kasus penyelundupan dengan jumlah besar.

Contoh kasus pertama pada 2010 terdapat 2 kasus penyelundupan berhasil digagalkan dengan total barang bukti sejumlah 8 Kilogram sabu. tahun selanjutnya 2011 terdapat penangkapan kasus penyelundupan narkoba dengan barang bukti sejumlah 6,7 Kg sabu. Barang Haram ini

akan diselundupkan lagi ke Jakarta dan Surabaya. Dari hasil pengakuan salah satu pelaku yang tertangkap ia telah kerap kali lolos melewati pos perbatasan melalui perbatasan Tebedu (Serawak) dan Entikong (Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat) (Nugraha, 2011).

Tahun 2012 terdapat tambahan 7 kasus penyelundupan melalui perbatasan darat Indonesia di Kalimantan Barat jika ditotalkan jumlah penyelundupan dari tahun 2010-2012 dengan barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak berwajib sejumlah 28 kilogram (Taufik, 2013). Selanjutnya pada Juli 2013 di Dusun Balai Karang 3, Kelurahan Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, aparat gabungan BNN Pusat dan BNNP Kalbar berhasil mengamankan 2.000 pil ekstasi dan 4 kg sabu-sabu, penyelundup berhasil ditangkap saat berada di biro travel sesaat setelah melintasi PLBB.

Berdasarkan kasus-kasus besar yang terjadi tahun 2010- 2012, didukung data BNN tahun 2013-2014 narkoba (sabu) yang telah berhasil masuk ke provinsi Kalimantan Barat melalui perbatasan terutama perbatasan darat Indonesia dan Malaysia diperkirakan berjumlah sekitar 150 kilogram sampai dengan 200 kilogram (Victor Muhamad, 2015).

Bukti lain dari kurang efektifnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebelumnya dalam penanganan penyelundupan dan penyebaran narkoba di perbatasan bisa dilihat dengan kasus narkoba di ibukota provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak menduduki posisi 4 (Empat) besar nasional penggunaan narkoba, hal ini kemudian menunjukkan bahwa Kalimantan Barat yang semula dianggap hanya sebagai tempat transit bagi penyelundupan narkoba telah menjadi daerah target pasar penyelundupan narkoba di Indonesia (Sawabi, 2010).

Banyaknya kasus penyelundupan narkoba yang berhasil ditangkap kemudian berbanding terbalik dengan turut meningkatnya prevalensi penggunaan narkoba nasional dan di provinsi Kalimantan Barat hal ini mengindikasikan penyelundupan yang berhasil masuk ke Indonesia lebih banyak dari yang berhasil digagalkan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam penanganan masalah narkoba dengan cara sebelumnya tidak berhasil atau kurang efisien.

Dari penjelasan data diatas,menunjukkan penyelundupan narkoba masih sulit diatasi, khususnya terkait penyelundupan narkoba di perbatasan darat Indonesia dan Malaysia di provinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu penting rasanya untuk meneliti lebih lanjut,mengapa daerah perbatasan darat Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat masih rawan penyelundupan narkoba setelah banyak upaya penanganan dilakukan serta strategi apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani masalah penyelundupan narkoba ini kedepannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

- Mengapa daerah perbatasan darat Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat masih menjadi daerah rawan penyelundupan narkoba setelah banyak upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebelumnya?
- Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah penyelundupan narkoba di perbatasan darat Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat pada 2014-2019?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis mengangkat penelitian dengan tema ini adalah:

1. Menganalisis penyebab maraknya penyelundupan narkoba lintas negara di perbatasan Indonesia terutama di perbatasan darat Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat dan melihat strategi pemerintah Indonesia pada tahun 2014-2019 dalam menangani maraknya kasus tersebut
2. Tulisan ini juga ditujukan untuk melengkapi tugas akhir penulis dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Hubungan Internasional Strata 2 (S2) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat seperti :

1. Memberi pemahaman kepada kita tentang masalah kejahatan transnasional terutama kejahatan penyelundupan narkoba di perbatasan darat Indonesia di Kalimantan Barat
2. Memunculkan pemahaman tentang strategi penanganan kejahatan Transnasional terutama penyelundupan narkoba oleh pemerintah Indonesia terutama di perbatasan darat Indonesia dan Malaysia di provinsi Kalimantan Barat.

E. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang kemudian membahas mengenai masalah yang berkaitan dengan berbagai penyebaran dan penyelundupan narkoba di Indonesia dan masalah-masalah yang berkaitan dengan perbatasan Indonesia terutama perbatasan Indonesia

dan Malaysia di Kalimantan Barat, penelitian yang membahas masalah penyebrán dan penyelundupan narkoba di Indonesia terutama yang berkaitan dengan perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat diantaranya adalah:

No	Nama peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Simela Victor Muhammad (2015)	<i>Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba Dari Malaysia Ke Indonesia: Kasus Di Provinsi Kepulauan Riau Dan Kalimantan Barat</i>	Penelitian deskriptif kualitatif, menggunakan data lapangan dan data kepustakaan sebagai sumber referensi	Hasil penelitian membahas bagaimana Indonesia menjadi target penyelundup melalui perbatasan, diketahui hal tersebut didorong oleh kurangnya pos resmi dan peralatan pemeriksaan ditambah minimnya aparat yang ditugaskan di daerah tersebut. Penelitian ini juga menyebutkan perlu peningkatan Kerjasama baik bilateral dan multilateral untuk menangani masalah penyelundupan tersebut.
2	Nabiela Ramadhani (2019)	<i>Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menurunkan Angka Peredaran Narkotika di Indonesia yang Dilakukan oleh Pengedar Asing Tahun 2014-2016</i>	Penelitian kualitatif dengan menggunakan data berupa dokumen seperti jurnal dan artikel Online sebagai referensi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah perbatasan Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan penyelundupan narkoba terutama daerah perairan, oleh karena itu Maka upaya yang juga dilakukan Pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan kerjasama baik multilateral dan bilateral serta membentuk regulasi dan UU untuk menunjukkan kapasitas pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam peredaran narkoba di tanah air.
3	Drs. Yulizar Gafar (2012)	Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) – Sarawak (Malaysia) (Studi Terhadap Peranan Badan Narkotika Nasional)	Penelitian kualitatif dengan menggunakan data berupa dokumen seperti jurnal dan artikel Online sebagai referensi	hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanggulangan penyelundupan yang dilakukan oleh BNN di perbatasan Indonesia masih harus mengalami beberapa keterhambatan hal ini didorong oleh pertama belum dibentuknya satuan tugas interdiksi gabungan BNN, Bea Cukai, petugas imigrasi yang ditempatkan ditempat-tempat yang dicurigai rawan sebagai ruang masuknya narkoba di Kalimantan Barat ,kedua belum tersedianya alat-alat canggih yang bekerja otomatis yang menunjang proses penanggulangan di perbatasan, ketiga masalah maraknya jalan tikus di perbatasan sepanjang 966 Km di perbatasan Kalimantan Barat. Dalam tulisan ini menjelaskan proses penanggulangan penyelundupan yang

				dilakukan oleh BNN akan berjalan lancar apabila ketiga hal diatas dapat terpenuhi.
4	Muhammad Gagah Dirgantara (2018)	<i>Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kejahatan Transnasional (Penyelundupan Narkoba) di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan</i>	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan sumber data dari data dokumen baik jurnal,buku, dan artikel online	Dalam penelitian ini membahas maraknya penyelundupan narkoba di perbatasan darat Indonesia dan Malaysia di Kalimantan yang kemudian harus ditangani oleh pemerintah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan dalam upaya penanganan masalah penyelundupan di perbatasan pemerintah Indonesia melakukan Kerjasama baik bilateral dan multilateral, mulai dengan aktif di Lembaga penanganan narkoba di perbatasan seperti ASOD, dan Kerjasama antar negara dengan Malaysia baik instansi pemerintah dan Lembaga Non pemerintah kedua negara.
5	Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya (2019)	<i>Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnational Organized Crime</i>	Penelitian doktrinal, di mana pada penelitian ini menggunakan,suatu metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Sumber data digunakan adalah data kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif	ini menyebutkan penyelundupan narkotika adalah masalah serius yang perlu perhatian khusus oleh pemerintah Indonesia,sebab itu pemerintah Indonesia membuat berbagai regulasi hukum untuk menangani masalah penyelundupan narkoba tersebut salah satunya dengan dibentuknya UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pembentukan hukum ini merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani masalah narkotika namun hal ini tidak cukup pemerintah harus melakukan pemenuhan alat penunjang pengamanan seperti armada laut dan alat pendeteksi untuk menangani masalah narkotika terutama masalah penyelundupan yang merupakan akar masalah narkoba di Indonesia.

6	Sara Gabriella (2019)	<i>Kerja Sama Indonesia-Interpol Dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Perbatasan Indonesia</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tracing untuk menjawab pertanyaan utama. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman tentang suatu peristiwa atau perilaku manusia dalam suatu organisasi atau institusi, cing merupakan metode untuk mendeskripsikan fenomena politik maupun sosial dan fokus pada mekanisme kausal yang menghubungkan beberapa variabel.	Hasil Tulisan ini menunjukkan adanya peran Interpol dalam kebijakan Indonesia mengurangi isu penyelundupan di wilayah perbatasan berdasarkan serangkaian kronologi data yang dianalisis dalam tiga variabel rezim. Artikel ini menjadi salah satu tulisan yang melihat pentingnya peran aktor negara tidak hanya dalam membentuk hubungan bilateral tetapi juga dengan organisasi internasional.
---	-----------------------	--	---	--

Tabel 1.1

Terkait penelitian yang membahas penyelundupan narkoba di Indonesia seperti yang telah diuraikan diatas, peneliti menemukan bahwa penelitian sebelumnya banyak membahas solusi dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani masalah penyelundupan narkoba di Indonesia cenderung dengan membentuk Kerjasama internasional baik bilateral dan multilateral yang melibatkan Lembaga-lembaga pemerintah seperti POLRI,BNN,TNI yang kemudian ditindak lanjuti dengan berbagai kegiatan seperti pengawasan daerah perbatasan, tukar informasi antar Lembaga dll.

Penelitian-penelitian sebelumnya juga sedikit banyak menyinggung masalah yang menjadi faktor penyebab beberapa tempat di Indonesia seperti perbatasan dan lainnya menjadi daerah rawan zona merah penyelundupan narkoba, diantaranya masih banyak kekurangan pos penjagaan yang dimiliki di wilayah perbatasan Indonesia,serta masih minimnya sarana pengamanan perbatasan yang dimiliki Indonesia seperti peralatan canggih untuk mendeteksi masuknya barang-barang ilegal, namun demikian dalam penelitian sebelumnya masih kurang merinci hal ini.

Secara umum penelitian sebelumnya banyak membahas masalah penyelundupan narkoba dominan menekankan kerjasama internasional dalam upaya menanggulangi masalah tersebut di Indonesia, selain itu beberapa penjelasan dalam penelitian-penelitian sebelumnya banyak mempertegas dalam upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Indonesia menekankan peran penting keterlibatan Lembaga negara yang cenderung militeristik seperti TNI,BNN dan POLRI untuk melakukan pengawasan dan patroli pengamanan perbatasan.

Pada penelitian sebelumnya para peneliti kurang tertarik membahas mengapa upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia cenderung kurang efisien dalam penanganan penyelundupan narkoba terutama di perbatasan, selain itu penelitian sebelumnya juga kurang meneliti faktor penyebab daerah perbatasan menjadi daerah rawan dan juga tidak meneliti apa sebaiknya upaya yang dilakukan dalam penanganan penyelundupan narkoba setelah mengetahui tidak efisiennya upaya penanganan sebelumnya dan mengetahui faktor penyebab terjadinya penyelundupan di perbatasan.

Oleh karena itu untuk melengkapi ruang yang belum banyak dibahas, penulis akan melakukan penelitian dengan menganalisis mengapa daerah perbatasan darat Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat masih menjadi daerah rawan penyelundupan narkoba setelah banyak upaya yang dilakukan pemerintah serta meneliti faktor penyebab maraknya penyelundupan di perbatasan serta mengkaji strategi penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani penyelundupan narkoba dari tahun 2014-2019 berdasarkan faktor penyebab kurang efisiennya penanganan masalah ini.

F. Kerangka Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan konsep keamanan nasional dan konsep strategi untuk menjelaskan mengapa daerah perbatasan darat Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat masih menjadi daerah rawan penyelundupan narkoba dan faktor yang mempengaruhi maraknya kasus kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di daerah perbatasan darat Indonesia di Kalimantan Barat serta upaya pemerintah Indonesia dalam penanganan masalah tersebut tahun 2014-2019.

1.f.1 Konsep Keamanan nasional

Ada banyak definisi keamanan nasional, salah satunya menyebutkan keamanan nasional sebagai konsep dimana sebuah pemerintahan, bersama dengan parlemen, harus melindungi negara dan warga negaranya terhadap berbagai krisis ‘nasional’ melalui berbagai proyeksi kekuatan, seperti kekuatan politik, diplomasi, kekuatan ekonomi, kemampuan militer dan lain sebagainya (Amaritasari, 2015). Diambil dari sumber lainnya Menurut Berkowitz, keamanan nasional dapat

sangat bermanfaat didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman pihak luar (Berkowitz Dalam Yeksi Anakotta & Sutra Disemadi, 2020:47)

Untuk melihat lebih jauh tentang ancaman keamanan nasional kita dapat melihat dari dua perspektif. Pertama dilihat dari sudut pandang tradisional, perspektif tradisional mendefinisikan keamanan nasional dengan istilah geopolitik dan membatasi pandangan keamanan nasional pada suatu yang ditimbulkan oleh hubungan antar negara, yang berkaitan dengan isu seperti Nuklir, *Balance Of Power*, Strategi militer, sederhananya pandangan tradisional menganggap dan melihat keamanan nasional adalah ancaman yang dilakukan oleh militer atau negara dan dalam penanganannya aktor negara atau militer sangat berperan (Sagena, 2013).

Seiring berjalannya waktu pasca berakhirnya perang dingin dengan runtuhnya dominasi Uni Soviet, muncul pandangan baru terhadap keamanan nasional. Fokus keamanan nasional menjadi lebih luas, bukan lagi sekedar militer dan negara tapi juga masalah-masalah baru seperti ekonomi, pembangunan, demokratisasi, konflik etnik, lingkungan hidup dan lainnya, yang merupakan potensi ancaman baru bagi keamanan nasional dan dikenal dalam perspektif keamanan nasional non tradisional (Rahman, 2016).

Keamanan perbatasan negara adalah salah satu masalah serius dalam pandangan keamanan nasional. Dalam banyak kasus di perbatasan negara berkembang isu militer berbaur dengan isu non militer, seperti isu ekonomi, sosial budaya dan politik domestik di perbatasan, yang kemudian menjadi isu lain dalam pertahanan negara selain isu militer, bahkan isu pembangunan perbatasan menjadi isu yang paling harus

diperhatikan, ini menunjukkan isu keamanan nasional perspektif non tradisional menjadi isu yang cukup marak di perbatasan negara terutama negara berkembang (Perwita, 2008).

Dari berbagai kasus yang terjadi di negara berkembang, banyak negara berbagi masalah keamanan nasional yang sama, diantaranya berkaitan dengan isu ekonomi, sosial, budaya, politik, termasuk isu pembangunan wilayah perbatasan (Tata Kelola Perbatasan) yang merupakan bagian dari *domestic vulnerabilities* yang kerap mendominasi agenda utama pembangunan keamanan nasional negara terutama negara berkembang, sehingga kemudian masalah-masalah tersebut banyak diterjemahkan sebagai objek utama pertahanan negara (Perwita, 2008).

Berbagai macam isu seperti yang disebutkan diatas yang terjadi di perbatasan negara berkembang menunjukkan signifikansi ancaman non militer dalam keamanan nasional, selain itu dengan bagaimana negara berkembang yang gagal menangani isu non militer seperti ekonomi, politik domestik dan hal lainnya di perbatasan negaranya kemungkinan akan menghadapi ancaman baru seperti ancaman aktor non negara di perbatasan, seperti penyelundupan narkoba dan berbagai aksi ilegal lainnya (Perwita, 2008).

Dengan mulai bergesernya ancaman keamanan nasional yang bukan hanya terjadi dari ancaman militer tetapi ada unsur lainnya seperti ekonomi, sosial pembangunan dan lainnya, kita harus Kembali mengkaji mengapa masalah keamanan nasional terjadi, seperti kasus yang menimpa perbatasan terutama pada perbatasan negara berkembang khususnya Indonesia, kita harus mengkaji Kembali mengapa kejahatan seperti penyelundupan narkoba masih terjadi di perbatasan Indonesia.

Dari penjelasan diatas ditarik kesimpulan keamanan nasional adalah bagaimana sebuah negara atau pemerintah menjaga keamanan negaranya, masyarakatnya dan nilai-nilai internal yang mereka miliki dari ancaman pihak luar dengan segenap upaya yang mereka miliki seperti dengan kekuatan politik, militer, ekonomi, sehingga menghasilkan rasa aman . melihat maraknya aksi ilegal di perbatasan negara berkembang kemungkinan disebabkan berbagai masalah seperti ekonomi, politik, pembangunan di perbatasan, hal ini menunjukkan bahwa negara berkembang masih belum mengerahkan segenap upaya perlindungan di perbatasannya.

Masih maraknya kasus penyelundupan narkoba di perbatasan Indonesia kemungkinan besar didorong oleh upaya penanganan masalah yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya tidak banyak berdampak pada faktor pendorong masalah penyelundupan narkoba di daerah perbatasan, seperti masalah minimnya pembangunan baik politik, ekonomi, Pendidikan, infrastruktur umum dan pengamanan di perbatasan. Pemerintah sebelumnya lebih fokus pada pengamanan yang bersifat militer dan atau pengamanan yang cenderung tradisional di daerah perbatasan tanpa memperhatikan masalah yang sebenarnya terjadi.

perspektif keamanan nasional perbatasan Indonesia selama ini terlalu fokus dan dekat pada pandangan keamanan nasional tradisional dimana fokus keamanan nasional perbatasan lebih mementingkan pada keamanan tanpa adanya pembangunan bidang lainnya di perbatasan, seperti pembangunan bidang ekonomi, Pendidikan, pembangunan sosial, pelayanan, infrastruktur dan lainnya, yang mana masalah dari kurang berkembangnya berbagai berbagai hal di perbatasan ini akan

menjadi masalah baru yang berpotensi menjadi ancaman keamanan nasional yang melibatkan aktor non tradisional

Masalah penyelundupan narkoba di perbatasan identik dengan keamanan nasional non tradisional, dimana masalah ini seperti yang dijelaskan diatas kemungkinan besar disebabkan oleh faktor buruknya tata Kelola perbatasan Indonesia yang mendorong aktor non negara melakukan kegiatan ilegal, oleh karena itu dalam upaya penyelesaiannya pemerintah harus melihat masalah tata Kelola perbatasan yang dimiliki Indonesia selama ini terutama dari sudut pandang keamanan non tradisional dalam upaya menangani masalah penyelundupan narkoba di perbatasan Indonesia termasuk perbatasan darat Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat.

1.f.2 Konsep Strategi

Dalam ilmu hubungan internasional pembahasan mengenai konsep strategi bukan lagi menjadi hal asing, dalam studi Hubungan Internasional strategi digunakan sebagai konsep untuk mencapai kepentingan nasional sebuah negara. Dalam pengertian klasik strategi seringkali di sangkut pautkan dengan perang dan militer, hal ini berdekatan dengan pengertian kata strategi secara etimologis yang berasal dari Bahasa Yunani yaitu *strategia* yang dapat diartikan sebagai *the art of general*, dimana strategi merupakan seni yang digunakan oleh panglima atau jenderal dalam sebuah penyerangan maupun pertempuran (Wardhani, 2016).

Seiring berjalannya waktu konsep strategi terus mengalami perkembangan tidak lagi berputar soal militer dan perang, hal ini didorong setelah berakhirnya perang dingin dimana muncul berbagai isu

baru dalam ilmu hubungan internasional seperti ekonomi, politik dan lainnya. Dengan bergesernya isu-isu tersebut tentunya akan semakin memperluas konsep strategi yang kemudian akan menghasilkan berbagai pendapat dan pandangan baru tentang strategi.

Namun dalam penelitian ini penulis menggunakan definisi strategi menurut *Stephanie K. Marrus* untuk menjelaskan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi masalah penyelundupan narkoba di Indonesia terutama di Kalimantan Barat. *Stephanie K Marrus* mendefinisikan Strategi sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak, yang berfokus pada tujuan jangka Panjang organisasi, disertai dengan penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut bisa tercapai (*Stephanie K. Marrus Dalam Utami, 2018:9*).

Dalam menangani kasus penyelundupan narkoba di perbatasan darat Kalimantan Barat, pemerintah Indonesia melalui perwakilan organisasi puncak(presiden), membentuk rencana berupa kebijakan yang merupakan sebuah proses dengan tujuan jangka Panjang organisasi (Negara) untuk menanggulangi penyelundupan narkoba di perbatasan, kebijakan ini berisi penyusunan suatu cara atau upaya penanggulangan masalah penyelundupan narkoba di perbatasan melalui pembangunan.

G. Hipotesa

Dari rumusan masalah diatas maka hipotesis penelitian ini adalah :

1. Maraknya penyelundupan narkoba di perbatasan darat Indonesia di Kalimantan Barat dikarenakan pemerintah tidak sepenuhnya menerapkan power yang mereka miliki dalam mengatasi masalah penyelundupan narkoba terutama di Perbatasan darat Kalimantan

Barat pada upaya penanganan masalah narkoba sebelumnya, maraknya penyelundupan di perbatasan didorong oleh buruknya pembangunan perbatasan baik infrastruktur, pembangunan sosial, ekonomi dan lainnya, pembangunan terutama di perbatasan seharusnya menjadi salah satu agenda utama pembangunan negara, apabila tidak dapat terlaksana dengan baik hal ini akan memicu berbagai masalah yang mengancam keamanan wilayah, masyarakat dan berbagai elemen di dalam negara Indonesia.

2. Dalam penanganan masalah penyelundupan narkoba 2014-2019 pemerintah Indonesia melalui perwakilan organisasi puncak (presiden), membentuk rencana berupa kebijakan yang merupakan sebuah proses dengan tujuan jangka Panjang organisasi (Negara) untuk menanggulangi penyelundupan narkoba di perbatasan, kebijakan ini berisi penyusunan suatu cara atau upaya penanggulangan masalah penyelundupan narkoba di perbatasan kebijakan ini diimplementasikan dalam program prioritas pembangunan daerah pinggiran atau perbatasan baik dalam pembangunan sosial, ekonomi, infrastruktur, birokrasi dan lainnya.

H. Metodologi Penelitian

Untuk memahami upaya penanganan masalah penyelundupan narkoba di perbatasan darat Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat, penulis menggunakan metode kualitatif dalam melakukan penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan pada pengamatan Fenomena dan lebih menekankan pada substansi makna pada fenomena tersebut Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat berpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan dalam penelitian.

Menurut Basri fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya (Basri, 2014). Fokus perhatian penelitian yang dilakukan dengan cara kualitatif lebih terfokus pada elemen manusia, objek dan institusi serta hubungan interaksi antar elemen-elemen tersebut dalam upaya memahami sebuah peristiwa, perilaku dan fenomena (Ardianto, 2019).

1.h.1 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian Eksplanatif, penelitian Eksplanatif merupakan penelitian yang mencari penjelasan sebuah fenomena, dan mencari jawaban sebuah fenomena. Merupakan tipe penelitian yang memberikan sebuah penjelasan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan kondisi subjek maupun objek penelitian dengan menjelaskan kedudukan serta hubungan antara variabel-variabel berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

1.h.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data melalui cara dokumentasi, dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang cukup banyak membantu para ilmuwan dalam menyelesaikan penelitian sosial. Sumber data yang penulis ambil berasal dari sumber seperti artikel berita, data dokumentasi dari instansi-instansi bersangkutan yang sebelumnya telah lebih dulu di publikasikan, Jurnal penelitian terpercaya dan berbagai sumber dokumentasi lainnya.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian, yaitu :

Bab I. Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Tujuan Penelitian, Kontribusi Riset, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Kerangka Konseptual, Hipotesa, serta Metodologi Penelitian yang digunakan sebagai proposal atau langkah awal dari penelitian.

Bab II. Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Penyelundupan Narkoba.

Bab III. Penyebab Rawannya Kejahatan Penyelundupan Narkoba Di Daerah Perbatasan Darat Indonesia Dan Malaysia Di Kalimantan Barat

Bab IV. Strategi Pemerintahan Indonesia Dalam Menangani Kasus Penyelundupan Narkoba di Perbatasan Darat Kalimantan Barat 2014-2019

Bab V. Kesimpulan Berisi Rangkuman Atau Ringkasan Berdasarkan Pada Hasil Yang Didapatkan Dari Penelitian.